



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

L A P O R A N PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025**



KPU Kota Balikpapan



kpubalikpapan



kpu.balikpapan



kota-balikpapan.kpu.go.id



KPU Kota Balikpapan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini dapat disusun dan diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan melayani.

Penyusunan laporan ini mengacu pada hasil pengisian dan penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi yang mencakup area perubahan, indikator, eviden pendukung, serta capaian yang telah dilaksanakan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai progres Reformasi Birokrasi serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut pada periode berikutnya.

Balikpapan, 13 Januari 2026

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan

Sekretaris,



*Susan Charly Rumate

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. DASAR HUKUM	3
BAB II HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	5
A. HASIL PELAKSANAAN	5
I. PEMENUHAN	5
II. REFORM	13
BAB III PENUTUP	17
A. KESIMPULAN	17
B. RENCANA TINDAK LANJUT	17
LAMPIRAN.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis pemerintah dalam melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara terencana dan terukur melalui delapan area perubahan yang dievaluasi menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Berdasarkan tabel LKE Reformasi Birokrasi, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan pada aspek manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini adalah untuk mendokumentasikan seluruh proses, kegiatan, dan capaian Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan berdasarkan indikator dan eviden pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE), serta sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menyajikan informasi yang sistematis dan terukur mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kota Balikpapan.
2. Menilai tingkat pemenuhan indikator Reformasi Birokrasi berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi.
3. Mengidentifikasi capaian, kendala, dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

C. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2023 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Noor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilin Umum Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. HASIL PELAKSANAAN

Berdasarkan tabel Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi, hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pada delapan area perubahan telah dilaksanakan dan didukung dengan eviden yang memadai. Capaian pelaksanaan meliputi:

I. PEMENUHAN

1. Manajemen Perubahan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, telah dilaksanakan Manajemen Perubahan secara terencana dan berkelanjutan. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran diwujudkan melalui:

a. Tim Reformasi Birokrasi

1. Pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi secara resmi melalui Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025;
2. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh "Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja; dan
3. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, kemudian hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

b. Road map Reformasi Birokrasi

1. Penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pada setiap area perubahan.
2. Rencana aksi disusun secara sistematis, terukur, dan selaras dengan indikator Reformasi Birokrasi serta target yang telah ditetapkan.
3. Seluruh pegawai telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi guna membangun pemahaman, komitmen dan partisipasi aktif dalam bersama mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

c. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

1. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB
2. Para asesor telah mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja

- sebelum menetapkan nilai PMPRB sebagaimana telah dilaksanakannya Rapat pengisian LKE dan telah didokumentasikan;
3. Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan;
 4. Penanggungjawab Reformasi Birokrasi internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja.

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

1. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Telah terdapat *Agent of Change* dan *role model*/yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

2. Deregulasi Kebijakan

Adapun yang telah dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan terkait deregulasi kebijakan dalam bentuk harmonisasi adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat;
- b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Yang telah dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan terkait Penataan dan Penguatan Organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi Kelembagaan
 1. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi;
 2. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi;
 3. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi;
 4. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan;
 5. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja;
 6. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya;
 7. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan;
 8. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan mandat;

9. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih sebagian fungsi;
10. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

b. Tindak Lanjut Evaluasi

1. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi; dan
2. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi.

4. Penataan Tatalaksana

Penataan Tatalaksana merupakan salah satu komponen pengungkit dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di KPU Kota Balikpapan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja melalui penyusunan, penerapan, serta evaluasi tata kelola organisasi yang jelas, terukur, dan berbasis sistem. Penataan ini diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang tertib prosedur, transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

a. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Penataan Tatalaksana, pada tahun 2024 dan 2025 KPU Kota Balikpapan telah menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan. Penyusunan SOP tersebut dituangkan secara resmi dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan, sehingga memiliki kekuatan hukum dan menjadi acuan yang wajib diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. SOP yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya diimplementasikan sebagai bagian dari pembentukan budaya kerja yang tertib, konsisten, dan berorientasi pada kinerja, serta dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan dinamika pelaksanaan tugas.

b. Keterbukaan Informasi Publik

Dalam aspek keterbukaan Informasi Publik, KPU Kota Balikpapan telah mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai sarana pelayanan informasi kepada masyarakat. Pelaksanaan layanan informasi publik melalui PPID tersebut telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi, baik di tingkat daerah maupun pusat. Atas komitmen dan konsistensi dalam memenuhi standar keterbukaan informasi, KPU Kota Balikpapan memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik dengan

Kualifikasi Informatif kategori Lembaga Nonstruktural dari Komisi Informasi Pusat pada tahun 2025.

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di KPU Kota Balikpapan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan SDM yang profesional, transparan, objektif, dan berbasis kompetensi. Penataan ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi serta penguatan integritas aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi

Dalam aspek perencanaan kebutuhan pegawai, KPU Kota Balikpapan telah menyusun kebutuhan pegawai yang mengacu pada Analisis Beban Kerja (ABK) dan peta jabatan. Perencanaan tersebut menjadi dasar dalam pengusulan kebutuhan pegawai agar sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan riil organisasi.

b. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Selain itu, KPU Kota Balikpapan juga melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan memberikan kesempatan yang setara kepada pegawai untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan oleh KPU RI. Pelaksanaan diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional pegawai agar mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

c. Penetapan Kinerja Individu

Dalam aspek penetapan dan pengukuran kinerja individu, KPU Kota Balikpapan menyusun Perjanjian Kinerja pada awal tahun sebagai dasar penetapan target kinerja individu yang selaras dengan sasaran kinerja pada level di atasnya. Pengukuran kinerja individu seluruh pegawai KPU Kota Balikpapan telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja, yang indikator kinerjanya memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan indikator kinerja unit dan organisasi. Penginputan dan penilaian kinerja dalam aplikasi E-Kinerja dilakukan secara periodik setiap triwulan dalam satu tahun sebagai bentuk pemantauan kinerja yang berkesinambungan.

d. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

KPU Kota Balikpapan juga telah mengimplementasikan ketentuan disiplin pegawai secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan disiplin ini bertujuan untuk menegakkan

kepatuhan, meningkatkan tanggung jawab pegawai, serta membentuk budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

e. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Pelaksanaan evaluasi jabatan dalam rangka Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan sebagai upaya penataan dan penguatan organisasi serta sistem manajemen SDM. Evaluasi jabatan dilakukan secara sistematis dan objektif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini KPU Kota Balikpapan telah mengimplementasikan standar kompetensi jabatan pada sebagian jabatan sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru.

f. Sistem Informasi Kepegawaian

Sebagai dukungan terhadap tertib administrasi dan akurasi data kepegawaian, KPU Kota Balikpapan telah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala. Pemanfaatan SIMPEG tersebut mendukung pengelolaan SDM yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis data.

6. Penguatan Akuntabilitas

a. Keterlibatan Pimpinan

Penguatan akuntabilitas kinerja di KPU Kota Balikpapan dilaksanakan melalui keterlibatan pimpinan secara langsung dan berkelanjutan dalam seluruh siklus manajemen kinerja. Pimpinan berperan aktif sejak tahap penyusunan perencanaan kinerja, penetapan indikator dan target kinerja, hingga pemantauan serta evaluasi atas capaian kinerja organisasi dan unit kerja. Keterlibatan tersebut memastikan bahwa perencanaan kinerja disusun secara terarah, selaras dengan tujuan strategis organisasi, serta berorientasi pada hasil dan peningkatan kinerja berkelanjutan.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, KPU Kota Balikpapan telah mengikutsertakan pegawai di dalam uji peningkatan kompetensi SDM sehingga mampu memahami dan mengimplementasikan pengelolaan kinerja secara efektif dan sesuai ketentuan.

Disamping itu telah dilakukan pula secara berkala untuk pemutakhiran data kinerja melalui pembaruan data pada aplikasi E-Kinerja, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja pegawai. Upaya ini mendukung tersedianya data kinerja yang akurat, mutakhir dan

terintegrasi sebagai dasar evaluasi kinerja serta pengambilan Keputusan manajerial yang akuntabel.

7. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan di KPU Kota Balikpapan dilaksanakan secara komprehensif melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi yang berorientasi pencegahan terjadinya penyimpangan, pelanggaran, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

a. Pengendalian Gratifikasi

Telah dilakukan Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi oleh KPU Kota Balikpapan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh Masyarakat namun belum dilakukan secara berkala. Salah satu bentuk pengendalian gratifikasi yang diimplementasikan dalam pelayanan publik adalah dalam setiap bentuk pelayanan yang diberikan dilakukan tanpa dipungut biaya.

b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, KPU Kota Balikpapan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan SPIP didukung dengan penguatan audit internal serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan rekomendasi Inspektorat. Hasil audit dan evaluasi internal dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan proses bisnis, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penguatan manajemen risiko organisasi.

c. Pengaduan Masyarakat

KPU Kota Balikpapan menyediakan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang mudah diakses, responsif, dan akuntabel salah satunya melalui PPID. Setiap pengaduan yang diterima ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku, didokumentasikan secara tertib, serta dilaporkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kepercayaan masyarakat.

d. Whistle Blowing System

Salah satu upaya penguatan pengawasan di KPU Kota Balikpapan adalah sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan internal sebagai sarana pelaporan pelanggaran yang aman, transparan, dan menjamin kerahasiaan pelapor. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keberanian pegawai dalam melaporkan dugaan pelanggaran secara bertanggung jawab.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

KPU Kota Balikpapan melaksanakan rapat koordinasi internal yang membahas pencegahan benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, serta penguatan nilai-nilai anti korupsi. Rapat koordinasi ini menjadi media penguatan komitmen bersama, penyampaian kebijakan dan ketentuan yang berlaku, serta identifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi integritas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

f. Pembangunan Zona Integritas

Pencanangan pembangunan Zona Integritas di KPU Kota Balikpapan telah dilakukan secara resmi sebagai bentuk pernyataan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk melakukan perubahan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan. Pencanangan tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh pimpinan dan pegawai, penyusunan rencana kerja pembangunan ZI, serta sosialisasi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan anti korupsi kepada seluruh pegawai.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, KPU Kota Balikpapan berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan layanan secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

a. Standar Pelayanan

Salah satu wujud komitmen tersebut adalah penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan unsur tokoh masyarakat, instansi pemerintah daerah, akademisi, serta media massa. FKP menjadi sarana strategis bagi KPU Kota Balikpapan sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk memperoleh masukan, saran, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan terkait standar pelayanan dan kebijakan pelayanan publik.

Pelaksanaan FKP bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama antara penyelenggara dan masyarakat pengguna layanan, sekaligus menjadi forum dialog dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perumusan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, serta dampak dan evaluasi kebijakan pelayanan publik. Hasil FKP dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Selain itu, KPU Kota Balikpapan juga berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dengan menyediakan fasilitas

yang ramah disabilitas, guna menjamin aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

b. Budaya Pelayanan Prima

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan di dalam meningkatkan kemampuan atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima salah satunya dengan mengikuti kegiatan keprotokolan di lingkungan KPU yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU RI.

Terkait dengan seluruh informasi tentang pelayanan yang ada di KPU Kota Balikpapan dapat pula diakses secara online melalui website <https://kota-balikpapan.kpu.go.id> atau media sosial Instagram, Facebook dan TikTok.

c. Pengelolaan Pengaduan

Untuk media konsultasi dan pengaduan di lingkungan KPU Kota Balikpapan dapat dilakukan secara offline maupun online namun belum tersedia petugas yang khusus menangani dan terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR).

Dalam hal evaluasi atas penanganan keluhan terhadap pelayanan yang ada di KPU Kota Balikpapan dilakukan suatu kegiatan Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perumusan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, serta dampak dan evaluasi kebijakan pelayanan publik

d. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Sebagai bentuk pengukuran kualitas layanan, KPU Kota Balikpapan secara rutin melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan yang diberikan. Survei dilakukan dengan membagikan tautan survei kepada masyarakat baik secara offline maupun online. Hasil survei tersebut menjadi indikator penting untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Apabila terdapat unsur pelayanan yang memperoleh penilaian kurang optimal, maka KPU Kota Balikpapan menindaklanjutinya melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat beserta tindak lanjut hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan periodik per semester dan dipublikasikan secara terbuka melalui website resmi KPU Kota Balikpapan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital, KPU Kota Balikpapan telah menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem KPU RI, sehingga pelayanan informasi dan administrasi kependidikan dapat diakses secara lebih cepat, efektif, dan efisien oleh masyarakat. Teknologi Informasi tersebut antara lain JDIH, Instagram, Facebook, Youtube, Website dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. REFORM

1. Manajemen Perubahan

a. Komitmen dalam Perubahan

1. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi, jumlah total agen perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kota Balikpapan; dan
2. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan. Jumlah perubahan yang telah dilakukan adalah pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi

b. Komitmen Pimpinan

Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai

c. Membangun Budaya Kerja

KPU Kota Balikpapan menerapkan budaya BerAkhlak di mana budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh pegawai dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.

2. Deregulasi Kebijakan

Peran Kebijakan, meliputi :

- a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya;
- b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja telah mencapai 100%:

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Organisasi Berbasis Kinerja, yaitu sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.

4. Penataan Tatalaksana

a. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan.

b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi

Sejalan dengan kebijakan nasional dan arahan dari KPU RI, KPU Kota Balikpapan juga telah mengimplementasikan berbagai sistem yang berbasis elektronik dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Implementasi SPBE di KPU Kota Balikpapan meliputi antara lain:

1. Pengukuran kinerja, penggunaan aplikasi E-Kinerja pada setiap triwulan dan Aplikasi E-Lapkin sebagai wadah pelaporan kinerja unit kerja setiap tahun;
2. Operasionalisasi manajemen sumber daya manusia, KPU Kota Balikpapan menggunakan aplikasi terpusat yaitu SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian);
3. Pelayanan kepada publik, KPU Kota Balikpapan menggunakan PPID sebagai sarana pelayanan publik.

Pemanfaatan sistem elektronik tersebut menjadi bagian integral dalam penataan tatalaksana yang modern, terintegrasi, dan berbasis data, sehingga mampu meminimalisasi potensi kesalahan administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan.

c. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat

Pemanfaatan digital dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada proses bisnis utama memberikan nilai manfaat nyata dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Digitalisasi proses kerja dilakukan melalui penerapan aplikasi dan sistem informasi yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, sehingga proses bisnis utama dapat berjalan lebih cepat, terstandar, dan terdokumentasi dengan baik. Selain meningkatkan transparansi dan

akurasi data, penerapan digital juga meminimalkan potensi kesalahan administratif serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip Reformasi Birokrasi.

Adapun aplikasi yang digunakan oleh KPU Kota Balikpapan dalam proses bisnis utama antara lain adalah Sidalih, Sipol, Simpaw, Simpeg, Siakba dan PPID.

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Kinerja Individu

Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya. Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan telah berorientasi pada hasil.

b. Assessment Pegawai

Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai.

c. Pelanggaran Disiplin Pegawai

Adanya penurunan jumlah pelanggaran disiplin pegawai dari tahun sebelumnya. Pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran ringan sehingga diberikan berupa Surat Teguran atau Nota Dinas Teguran.

6. Penguatan Akuntabilitas

a. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran

Jumlah anggaran pada KPU Kota Balikpapan yang sesuai dengan DIPA Revisi ke 11 Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.918.084.000 yang digunakan untuk mendukung 2 program dan 3 kegiatan dan telah mencapai sasaran kinerja 100%.

b. Pemanfaat Aplikasi Akuntabilitas Kinerja

Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi penganggaran.

c. Pemberian Reward and Punishmen

Capaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) pada KPU Kota Balikpapan belum menjadi unsur dalam pemberian reward dan punishment.

d. Kerangka Logis Kinerja

Terdapat Peta strategis (Kerangka Logis) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai. Kerangka Logis tersebut berupa Matrik Pembagian Peran dan Hasil pada setiap Sub Bagian.

7. Penguatan Pengawasan

a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Persentase Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) telah mencapai 100%

b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Persentase Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) telah mencapai 100%; dan

c. Penanganan pengaduan masyarakat

Hingga saat dibuatnya laporan ini tidak ada aduan dari masyarakat

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan melalui berbagai upaya dan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Instansi melakukan penyempurnaan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses layanan, serta penguatan kompetensi petugas layanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Inovasi pelayanan publik dikembangkan untuk menyederhanakan alur layanan, mempercepat waktu penyelesaian, serta memperluas akses informasi layanan kepada masyarakat. Selain itu, instansi secara berkala melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, sehingga kualitas pelayanan publik terus meningkat sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi.

b. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi

Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai media.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kota Balikpapan telah dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan melalui penerapan delapan area perubahan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam mewujudkan birokrasi yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik.

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi tercermin dari meningkatnya integritas aparatur, membaiknya akuntabilitas dan capaian kinerja, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Capaian tersebut menjadi dasar bagi KPU Kota Balikpapan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, KPU Kota Balikpapan menyusun rencana tindak lanjut yang berorientasi pada penguatan hasil dan perbaikan berkelanjutan.

1. Penguatan komitmen pimpinan dan pegawai KPU Kota Balikpapan melalui internalisasi nilai integritas, peningkatan budaya kerja profesional, serta konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap kebijakan, SOP, dan sistem kerja agar tetap selaras dengan dinamika regulasi dan kebutuhan organisasi;
3. Peningkatan kompetensi Pegawai, optimalisasi pembagian tugas, serta penerapan penilaian kinerja yang lebih terukur dan berbasis hasil;
4. Penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut atas hasil pengawasan serta pengaduan masyarakat akan terus ditingkatkan guna mencegah potensi pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan publik;
5. Peningkatan kualitas layanan yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis teknologi informasi terintegrasi dengan KPU RI;
6. Hasil Survei Persepsi Korupsi dan Survei Kepuasan Masyarakat akan dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan layanan dan peningkatan integritas aparatur.

LEMBAR KERJA EVALUASI
REFORMASI BIROKRASI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
A. PENGUNGKIT		36,30				28,27	77,87%			
I. PEMENUHAN		14,60				10,92	0,75			
1. MANAJEMEN PERUBAHAN		2,00				1,91	0,96			
i. Tim Reformasi Birokrasi		0,40				0,31	0,78			
	a. Tim Reformasi Birokrasi/Penangggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk		a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penangggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penangggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa ketetapan formal c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penangggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja	A/B/C	A	1,00		Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Road Map Pemantauan	SK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI.pdf
	b. Tim Reformasi Birokrasi/Penangggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja		a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penangggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penangggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penangggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penangggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja	A/B/C/D	B	0,67		Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025.pdf
	c. Tim Reformasi Birokrasi/Penangggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti		a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi,	A/B/C/D	B	0,67		Rapat terkait dengan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi	1. Rencana aksi 2. Dokumentasi Rapat Pleno Rutin	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025.pdf DOKUMENTASI RAPAT PLENO RUTIN TAHUN 2025.pdf
ii. Road Map Reformasi Birokrasi		0,40				0,40	1,00			
	a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan		Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Ya/Tidak	Ya	1,00		Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025.pdf
	b. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi		a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	A	1,00		Rapat terkait dengan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi	1. Rencana aksi 2. Dokumentasi; 2. Dokumentasi Rapat Pleno Rutin	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025.pdf DOKUMENTASI RAPAT PLENO RUTIN TAHUN 2025.pdf
	c. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map		a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road Map c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab	A/B/C	A	1,00		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT-07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	1. Roadmap RB KPU 2020-2024; 2. Rencana Aksi RB Tahun Berjalan;	ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KPU TAHUN 2020-2024 (KPT 612 JHN 2020).pdf
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi		0,80				0,80	1,00			
	a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku		a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh	A/B/C/D	A	1,00		Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	1. SK Tim RB Tahun berjalan yang sudah diformalisasi; 2. Rencana Aksi RB Berjalan	SK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI.pdf Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025.pdf
	b. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB		a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas c. Para asesor belum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas	A/B/C	A	1,00		Rapat internal Pejabat Struktural di dalam pengisian LKE Reformasi Birokrasi		Dokumentasi Pengisian LKE RB 2025.pdf

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
		c.	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan		a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A/B/C	A	1,00			- Penandatanganan Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM KPU Kota Balikpapan - Rapat Koordinasi Internal Pencegahan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi - Sosialisasi Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) pada KPU Kota Balikpapan	Laporan Kegiatan Anti Korupsi.pdf
		d.	Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja		a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	A	1,00		Dokumentasi Rapat Pleno Rutin	Dokumentasi Rapat Pleno Rutin	DOKUMENTASI RAPAT PLENO RUTIN TAHUN 2025.pdf
		iv.	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	0,40				0,40	1,00			
		a.	Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi		a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	A	1,00		Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025	SK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI.pdf
		b.	Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model		a. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change dan role model namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change dan role model	A/B/C/D	A	1,00		1. Pimpinan KPU Kota Balikpapan ikut serta di dalam penandatanganan Pakta Integritas reformasi salah satu Rencana Aksi 2. Pimpinan selalu memberikan arahan dan evaluasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3. Pimpinan KPU Kota Balikpapan turut hadir di setiap pelaksanaan Apel Senin dan dalam rapat pleno	1. Postingan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan arahan pimpinan: https://www.instagram.com/kpu/bal/IG 2. Postingan Pimpinan rutin melaksanakan Rapat Pleno: https://www.instagram.com/kpu/bal/IG 3. Postingan pimpinan mengikuti apel rutin: https://www.instagram.com/kpu/bal/IG	SK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI.pdf
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN	1,00				1,00	1,00			
		-	Harmonisasi	1,00				1,00	1,00			
		a.	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus		a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat	A/B/C	A	1,00		Daftar Surat Keputusan yang dikeluarkan KPU Kota Balikpapan Tahun 2025	Daftar Surat Keputusan yang dikeluarkan KPU Kota Balikpapan Tahun 2025	Daftar SK Ketua dan Sekretaris Tahun 2025
		b.	Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat		a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak harmonis/tidak sinkron/ bersifat menghambat	A/B/C	A	1,00		Daftar Surat Keputusan yang dikeluarkan KPU Kota Balikpapan Tahun 2025	Daftar Surat Keputusan yang dikeluarkan KPU Kota Balikpapan Tahun 2025	Daftar SK Ketua dan Sekretaris Tahun 2025
		3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2,00				1,67	0,84			
		i.	Evaluasi Kelembagaan	1,00				1,00	1,00			
		a.	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian fungsi dan ukuran organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan	A/B/C	A	1,00		Seluruh pegawai ASN maupun PPPK telah melaksanakan evaluasi kinerja melalui pengisian E- Kinerja	Saasaran Kinerja Pegawai Matrik Pembagian Peran dan Hasil	SKP 2025 Matrik Pembagian Peran dan Hasil

Penilaian			Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
		b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	A/B/C	A	1,00		Seluruh pegawai ASN maupun PPPK telah melaksanakan evaluasi kinerja melalui pengisian E-Kinerja	Saasaran Kinerja Pegawai Matrik Pembagian Peran dan Hasil	SKP 2025 Matrik Pembagian Peran dan Hasil
		c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan duplikasi fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	A/B/C	A	1,00		Seluruh pegawai ASN maupun PPPK telah melaksanakan evaluasi kinerja melalui pengisian E-Kinerja	Saasaran Kinerja Pegawai Matrik Pembagian Peran dan Hasil	SKP 2025 Matrik Pembagian Peran dan Hasil
		d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	A/B/C	A	1,00		Seluruh pegawai ASN maupun PPPK telah melaksanakan evaluasi kinerja melalui pengisian E-Kinerja	Saasaran Kinerja Pegawai Matrik Pembagian Peran dan Hasil	SKP 2025 Matrik Pembagian Peran dan Hasil
		e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya		a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja	A/B/C	A	1,00		Seluruh pegawai ASN maupun PPPK telah melaksanakan evaluasi kinerja melalui pengisian E-Kinerja	Saasaran Kinerja Pegawai Matrik Pembagian Peran dan Hasil	SKP 2025 Matrik Pembagian Peran dan Hasil
		f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya		a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya	A/B/C	A	1,00		Seluruh pegawai ASN maupun PPPK telah melaksanakan evaluasi kinerja melalui pengisian E-Kinerja	Saasaran Kinerja Pegawai Matrik Pembagian Peran dan Hasil	SKP 2025 Matrik Pembagian Peran dan Hasil
		g. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	A/B/C	A	1,00		Seluruh pegawai ASN maupun PPPK telah melaksanakan evaluasi kinerja melalui pengisian E-Kinerja	Saasaran Kinerja Pegawai Matrik Pembagian Peran dan Hasil	SKP 2025 Matrik Pembagian Peran dan Hasil
		h. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan		a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan mandat c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	A/B/C	A	1,00		Seluruh pegawai ASN maupun PPPK telah melaksanakan evaluasi kinerja melalui pengisian E-Kinerja	Saasaran Kinerja Pegawai Matrik Pembagian Peran dan Hasil	SKP 2025 Matrik Pembagian Peran dan Hasil
		i. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih sebagian fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi	A/B/C	A	1,00		Seluruh pegawai ASN maupun PPPK telah melaksanakan evaluasi kinerja melalui pengisian E-Kinerja	Saasaran Kinerja Pegawai Matrik Pembagian Peran dan Hasil	SKP 2025 Matrik Pembagian Peran dan Hasil
		j. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	A/B/C	A	1,00		Seluruh pegawai ASN maupun PPPK telah melaksanakan evaluasi kinerja melalui pengisian E-Kinerja	Saasaran Kinerja Pegawai Matrik Pembagian Peran dan Hasil	SKP 2025 Matrik Pembagian Peran dan Hasil
	II.	Tindak Lanjut Evaluasi	1,00				0,67	0,67			
		a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi		a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	B	0,67		Evaluasi Kelembagaan yang dilakukan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan telah disampaikan ke KPU sebagai masukan untuk perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	https://drive.google.com/file/d/1u8lEQsv34neCHJK1NQYackY2srPCRa6i/view?usp=sharing

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
			b.		Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi					Hasil Evaluasi telah ditindaklanjuti dengan ditetapkan SOTK baru pada Sekretariat KPU Kota Balikpapan	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	https://drive.google.com/file/d/1wVp4FC8F1fD0bXJwksUuDKBrVpW5_5/view?usp=sharing
					a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	B	0,67				
			4	1,00	PENATAAN TATALAKSANA			0,90	0,90			
			i.	0,50	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)			0,40	0,79			
			a.		Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis							
					a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	A/B/C	A	1,00		KPU Kota Balikpapan telah menyusun SOP Tahun 2024 dan 2025		SOP TA 2024 dan 2025
			b.		Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi							
					a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C	B			KPU Kota Balikpapan telah menyusun SOP Tahun 2024 dan 2025		SOP TA 2024 dan 2025
			c.		Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi							
					a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	A/B/C	B	0,50		KPU Kota Balikpapan telah menyusun SOP Tahun 2024 dan 2025		SOP TA 2024 dan 2025
			d.		Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang							
					a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja	A/B/C/D	B	0,67		KPU Kota Balikpapan telah menyusun SOP Tahun 2024 dan 2025		SOP TA 2024 dan 2025
			e.		Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)					Jelaskan tentang SOP di lingkungan Sekretariat: 1. Apakah setiap Bagian/Sub Bagian sudah memiliki SOP? SUDAH 2. Apakah seluruh SOP sudah disahkan? SUDAH	KPU Kota Balikpapan telah menyusun SOP Tahun 2024 dan 2025	SOP TA 2024 dan 2025
			f.		Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP					Setiap Sub Bagian telah menyusun Prosedur Operasional Tetap	KPU Kota Balikpapan telah menyusun SOP Tahun 2024 dan 2025	SOP TA 2024 dan 2025
					a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	A/B/C	B	0,50				
			g.		Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan					Jelaskan kondisi eksisting SOP di lingkungan Sekretariat: 1. Apakah setiap bagian/Subbagian telah memiliki SOP? SUDAH	KPU Kota Balikpapan telah menyusun SOP Tahun 2024 dan 2025	SOP TA 2024 dan 2025
					a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan	A/B/C/D	A	1,00				
			h.		Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi					Jelaskan tentang Evaluasi SOP di lingkungan Sekretariat: 1. Apakah SOP yang ada sudah di evaluasi: 2. Evaluasi SOP dilakukan berkala/tidak berkala?: 3. Apakah rekomendasi hasil evaluasi sudah dilaksanakan?	KPU Kota Balikpapan menyampaikan hasil reu dan evaluasi SOP tahun 2024 kepada KPU Provinsi Kaltim	247_Penyampaian Hasil Reviu dan Evaluasi SOP Tahun 2024.pdf
					a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A/B/C/D	A	1,00				

Penilaian			Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
		i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	A/B/C	A	1,00		KPU Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi terhadap seluruh SOP tahun 2024	KPU Kota Balikpapan menyampaikan hasil revidi dan evaluasi SOP tahun 2024 kepada KPU Provinsi Kaltim	247_Penyampaian Hasil Reviu dan Evaluasi SOP Tahun 2024.pdf
		ii. Keterbukaan Informasi Publik	0,50				0,50	1,00			
		a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik		Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya/Tidak	Ya	1,00		KPU Kota Balikpapan menggunakan PPID sebagai sarana pelayanan Publik	1. Struktur PPID 2. SOP PPID 3. Form PPID	PPID
		b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A/B/C	A	1,00		Evaluasi dan Monitoring oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur	Telah dilakukan Evaluasi dan Monitoring dari Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur	https://www.instagram.com/reel/DOKw6b8kTe7igsh=djIzanBScWw5dGUS
		5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40				1,05	0,75			
		i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan	0,20				0,14	0,72			
		a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja		a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan unit kerja c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A/B/C	A	1,00		Kebutuhan Pegawai KPU Kota Balikpapan yang diusulkan berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan	Kebutuhan Pegawai KPU Kota Balikpapan yang diusulkan berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan	SK SEKRETARIAT KPU BPP.zip
		b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan		a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C	B	0,50		Sekretariat KPU Kota Balikpapan telah melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan	Kebutuhan Pegawai KPU Kota Balikpapan yang diusulkan berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan	SK SEKRETARIAT KPU BPP.zip
		c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama		a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C/D	B	0,67		Sekretariat KPU Kota Balikpapan telah melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan selaras dengan kinerja utama	Kebutuhan Pegawai KPU Kota Balikpapan yang diusulkan berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan	SK SEKRETARIAT KPU BPP.zip
		ii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0,20				0,20	1,00			
		a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi		a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan	A/B/C/D	A	1,00		Jelaskan apakah sekretariat KPU Kota Balikpapan Memiliki/melakukan identifikasi pengembangan kompetensi/kebutuhan kompetensi seluruh pegawai di lingkungannya?	KPU Kota Balikpapan merekomendasikan pegawai untuk mengikuti pelatihan	563_SPENYAMPAIAN NAMA SELEKSI PBJ LEVEL-1.pdf 55_ST Seleksi Calon Peserta Seleksi Pelatihan PBJ Lv-I.pdf
		b. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi		a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A/B/C/D	A	1,00		Jelaskan apakah sekretariat KPU Kota Balikpapan Memiliki/melakukan identifikasi pengembangan kompetensi/kebutuhan kompetensi seluruh pegawai di lingkungannya dan dijadikan sebagai rencana pengembangan kompetensi sekretariat?	KPU Kota Balikpapan merekomendasikan pegawai untuk mengikuti pelatihan	563_SPENYAMPAIAN NAMA SELEKSI PBJ LEVEL-1.pdf 55_ST Seleksi Calon Peserta Seleksi Pelatihan PBJ Lv-I.pdf
		iii. Penetapan Kinerja Individu	0,40				0,30	0,75			
		a. Penerapan Penetapan kinerja individu		a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu	A/B/C/D	B	0,67		Jelaskan apakah sekretariat KPU Kota Balikpapan Menerapkan Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai.	KPU Kota Balikpapan telah menerapkan penetapan kinerja individu sesuai dengan jabatan masing-masing pegawai	SKP 2025

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/ Dokumen	Link
	b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	B	0,67		Jelaskan apakah SKP/Laporan kinerja harian/ PK, memiliki keterkaitan dengan kinerja organisasi.	Laporan Kinerja Bulanan	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEPZNDHENVLWmW5trm9uXZiUe7Rw3dJhNq3dOHPZGA/viewform
	c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya		a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya	A/B/C/D	B	0,67		Jelaskan apakah SKP/Laporan kinerja harian/ PK, memiliki keterkaitan dengan kinerja organisasi. YA	1. Laporan Kinerja Bulanan 2. Perjanjian Kinerja 3. Sasaran Kinerja Pegawai SKP 2025	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEPZNDHENVLWmW5trm9uXZiUe7Rw3dJhNq3dOHPZGA/viewform
	d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A/B/C/D/E	B	0,75		Jelaskan apakah pengukuran kinerja individu dilakukan?	Laporan Kinerja Bulanan	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEPZNDHENVLWmW5trm9uXZiUe7Rw3dJhNq3dOHPZGA/viewform
	e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.		a. Telah dilakukan money atas pencapaian kinerja individu secara bulanan b. Telah dilakukan money atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan c. Telah dilakukan money atas pencapaian kinerja individu secara semesteran d. Telah dilakukan money atas pencapaian kinerja individu secara tahunan e. Belum dilakukan money atas pencapaian kinerja individu	A/B/C/D/E	B	0,75		Jelaskan apakah sekretariat KPU Kota Balikpapan melakukan money atas evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	3. Sasaran Kinerja Pegawai SKP 2025	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEPZNDHENVLWmW5trm9uXZiUe7Rw3dJhNq3dOHPZGA/viewform
	f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya		a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya	A/B/C/D	A	1,00		Jelaskan apakah kinerja individu di lingkungan sekretariat KPU Kota Balikpapan telah menjadi dasar untuk pengembangan karir dan reward punishment.	Daftar Tunjangan Kinerja TUKIN	https://drive.google.com/file/d/1msuOQmYU10Wb4d1Rxd2YmLMu2KtVtB/view?usp=sharing
iv.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,20	a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan	A/B/C/D	B	0,67	0,12	Jelaskan apakah sekretariat KPU Kota Balikpapan, Memiliki aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan. YA	KPU Kota Balikpapan telah mengimplementasikan terkait aturan dan disiplin pegawai baik itu dari Keputusan Sekretaris Jenderal KPU dan Nota Dinas Sekretaris KPU Kota Balikpapan	https://drive.google.com/file/d/1msuOQmYU10Wb4d1Rxd2YmLMu2KtVtB/view?usp=sharing
	b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku		a. Adanya money atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala b. Adanya money atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala c. Belum ada money atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	A/B/C	B	0,50		Jelaskan apakah sekretariat KPU Kota Balikpapan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku (Kode etik Penyelenggara Pemilu KPU 13 Tahun 2012).	KPU Kota Balikpapan melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Disiplin Pegawai melalui absensi pegawai dengan melakukan pemotongan tunjangan kinerja sesuai dengan aturan jika terjadi pelanggaran disiplin pegawai	TUKIN
	v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20	a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian jabatan d. SKJ belum diimplementasi	A/B/C/D	C	0,33	0,08	Sekretariat KPU Kota Balikpapan telah mengimplementasikan standar kompetensi jabatan pada sebagian jabatan.		SK-SOTE-BARU.pdf

Penilaian			Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Unk
		b. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ		a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ d. Evaluasi jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ e. Evaluasi jabatan belum dilaksanakan	A/B/C/D/E	C	0,50		KPU Sekretariat Kota Balikpapan telah memiliki standar kompetensi jabatan pada sebagian jabatan.		SK SOTK BARU.zip
		vi. Sistem Informasi Kepegawalan	0,20				0,20	1,00			
		- Sistem Informasi kepegawalan dapat diakses oleh pegawai		Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawalan	Ya/Tidak	Ya	1,00		Jelaskan apakah dilingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan Para pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawalan.	Aplikasi SIASN	Aplikasi E Kinerja.jpeg
		6. PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50				1,42	0,57			
		i. Keterlibatan pimpinan	1,00				0,67	0,67			
		a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra		a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Renstra c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Renstra d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A/B/C/D	B	0,67		Jelaskan apakah Pimpinan KPU Kota Balikpapan Melakukan formalisasi Renstra, ikut serta dalam penyusunan/revisi dan memahami setiap rencana strategis dan strategi pencapaiannya.	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja KPU Kota Balikpapan Tahun 2025.pdf
		b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Penetapan Kinerja c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Penetapan Kinerja d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A/B/C/D	B	0,67		Jelaskan apakah Pimpinan KPU Kota Balikpapan Menyusun/menformalisasikan Penetapan Kinerja Tahunan, terlibat secara langsung dalam menyusun/merevisi dokumen dan memahami apa yang diperjanjikan dalam dokumen.	Dokumentasi Rapat Pleno Rutin	Postingan Pimpinan rutin melaksanakan Rapat Pleno: https://www.instagram.com/reel/DQqxV6fEhzw/?igsh=Nzd673dxZXViNmR0
		c. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja secara berkala c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A/B/C/D	B	0,67		Jelaskan apakah Pimpinan KPU Kota Balikpapan Memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala, seberapa sering dilakukan hal tersebut?	Dokumentasi Rapat Pleno Rutin	Postingan Pimpinan rutin melaksanakan Rapat Pleno: https://www.instagram.com/reel/DQqxV6fEhzw/?igsh=Nzd673dxZXViNmR0
		d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah		a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada	A/B/C/D	B	0,67		Jelaskan apakah Pimpinan KPU Kota Balikpapan Melakukan formalisasi Renstra, ikut serta dalam penyusunan/revisi dan memahami setiap rencana strategis dan strategi pencapaiannya.		Dokumentasi Rapat Pleno
		e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun		a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada	A/B/C/D	B	0,67		Jelaskan apakah Pimpinan KPU Kota Balikpapan Menyusun/menformalisasikan Penetapan Kinerja Tahunan, terlibat secara langsung dalam menyusun/merevisi dokumen dan memahami apa yang diperjanjikan dalam dokumen.	Dokumentasi Rapat Pleno Rutin Tahun 2025 Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2025	Dokumentasi Rapat Pleno Perjanjian Kinerja KPU Kota Balikpapan Tahun 2025.pdf
		f. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja	A/B/C/D	B	0,67		Jelaskan apakah Pimpinan Sekretariat KPU Kota Balikpapan Menyusun rencana aksi pencapaian kinerja berkala dan menindaklanjuti hasil pemantauan secara berkala?	Pimpinan Sekretariat KPU Kota Balikpapan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan secara berkala melalui E-Kinerja	SKP 2025
		ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50				0,75	0,50			

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
		a.	Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	A	1,00		Jelaskan apakah sekretariat KPU Kota Balikpapan Melakukan berbagai upaya upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja (baik berbagai peningkatan kompetensi oleh KPU Pusat/Kolaborasi dengan K/L/P setempat/Menugaskan mengikuti kegiatan di K/L/P lain)	Pegawai KPU Kota Balikpapan diikutkan dalam uji peningkatan kompetensi SDM	https://drive.google.com/file/d/1OgnARhAx6wRL-NeLs_FpS9u4-9KNh2/view?usp=sharing
		b.	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala		a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A/B/C/D/E	E	0,00		Jelaskan apakah sekretariat KPU Kota Balikpapan Melakukan pemutakhiran/update/menginput aplikasi kinerja secara berkala, dan seberapa sering hal tersebut dilakukan?	KPU Kota Balikpapan melakukan update pada aplikasi E-Kinerja per 3 bulan	SKP 2025
		7	PENGUATAN PENGAWASAN	2,20				1,58	0,72			
		I.	Gratifikasi	0,30				0,11	0,38			
		a.	Telah dilakukan <i>public campaign</i>		a. <i>Public campaign</i> telah dilakukan secara berkala b. <i>Public campaign</i> dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan <i>public campaign</i>	A/B/C	B	0,50		Jelaskan apakah Public campaign Gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan.telah dilakukan secara berkala?	Public Campaign telah dilakukan di media sosial namun belum secara berkala	https://www.instagram.com/p/DPVj3eUj6cU/
		b.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan		Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1,00		Jelaskan apakah penanganan gratifikasi di lingkungan sekretariat KPU Kota Balikpapan telah diimplementasikan/dilaksanakan/diterapkan?	Telah diterapkan melalui penandatanganan komitmen bersama anti gratifikasi oleh jajaran pimpinan dan staff di KPU Kota Balikpapan	https://www.instagram.com/p/DR_uuekmDn/
		c.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya/Tidak	Tidak	0,00		Jelaskan apakah penanganan gratifikasi di lingkungan sekretariat KPU Kota Balikpapan telah di evaluasi atas penanganan kebijakan gratifikasi?	Belum ada kasus penerimaan gratifikasi	
		d.	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti		Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya/Tidak	Tidak	0,00		Jelaskan apakah penanganan gratifikasi di lingkungan sekretariat KPU Kota Balikpapan telah di evaluasi dan apakah evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti?	Belum ada kasus penerimaan gratifikasi	
		II.	Penerapan SPIP	0,30				0,27	0,89			
		a.	Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian		a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian	A/B/C	A	1,00		Jelaskan apakah di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan Telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian.	Penerapan dan pelaporan SPIP dilakukan oleh seluruh subbagian dan finalisasi dalam forum rapat pleno	Dokumentasi Rapat Pleno SPIP Desember 2025
		b.	Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja		a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko	A/B/C/D	B	0,67		Jelaskan apakah di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan Telah melakukan penilaian risiko unit kerja.	KPU Kota Balikpapan telah melakukan penilaian risiko dengan pengisian risk register	Risk Register KPU Kota Balikpapan
		c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian d. Risiko belum dikendalikan	A/B/C/D	B	0,67		Jelaskan apakah di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan Telah melakukan pengendalian untuk meminimalisir seluruh risiko yang telah diidentifikasi.	KPU Kota Balikpapan melakukan pengisian risk register	Risk Register KPU Kota Balikpapan
		d.	Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A/B/C/D	A	1,00		Jelaskan apakah di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan Telah menginformasikan SPI dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.	SPI telah diinformasikan ke seluruh pihak terkait (Anggota KPU, KPU Provinsi dan Inspektorat) melalui rapat pleno dan pengiriman dokumen pada link yang tersedia	Dokumentasi Rapat Pleno SPIP Desember 2025
		e.	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern		a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A/B/C	A	1,00		Jelaskan apakah di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan Telah melakukan monev berkala Pemantauan pengendalian intern.	Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala, sebulan sekali dalam rapat pleno SPIP yang dihadiri oleh seluruh Tim Satgas SPIP dan rapat koordinasi wilayah Kaltim oleh KPU Provinsi Kaltim	Dokumentasi Rapat Pleno SPIP Desember 2025
		f.	Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI		a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI	A/B/C/D	A	1,00		Jelaskan apakah di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan Telah melakukan evaluasi berkala penerapan SPI?	Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala, sebulan sekali dalam rapat pleno SPIP yang dihadiri oleh seluruh Tim Satgas SPIP dan rapat koordinasi wilayah Kaltim oleh KPU Provinsi Kaltim	Dokumentasi Rapat Pleno SPIP Desember 2025
		iii.	Pengaduan Masyarakat	0,50				0,25	0,50			

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
	a. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	A/B/C/D	A	1,00		Jelaskan apakah di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan. Telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat?		PENGADUAN MASYARAKAT
	b. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	B	0,50		Jelaskan apakah di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan. Telah dilakukan evaluasi berkala pengaduan masyarakat?		PENGADUAN MASYARAKAT
	c. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya/Tidak	Tidak	0,00		Jelaskan apakah di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan. Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi berkala pengaduan masyarakat?		PENGADUAN MASYARAKAT
	iv. <i>Whistle Blowing System</i>	0,30				0,30	1,00			
	- <i>Whistle Blowing System</i> telah disosialisasikan		a. <i>Whistle blowing system</i> disosialisasikan ke seluruh pegawai b. <i>Whistle blowing system</i> disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. <i>Whistle blowing system</i> disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. <i>Whistle blowing system</i> belum disosialisasikan	A/B/C/D	A	1,00		Jelaskan apa di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan telah disosialisasikan WBS, apakah terdapat instrumen WBS?	KPU Kota Balikpapan telah melakukan Sosialisasi Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) terhadap seluruh pegawai.	Laporan Kegiatan Rkor Internal Penanganan Anti Korupsi, Benturan Kepentingan, Gratifikasi dan Sosialisasi WBS.pdf
	v. Penanganan Benturan Kepentingan	0,30				0,24	0,79			
	a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan		a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh pegawai b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan	A/B/C/D	A	1,00		Jelaskan apa di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan telah disosialisasikan Penanganan Benturan Kepentingan/KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	KPU Kota Balikpapan telah melakukan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Balikpapan	Laporan Kegiatan Rkor Internal Penanganan Anti Korupsi, Benturan Kepentingan, Gratifikasi dan Sosialisasi WBS.pdf
	b. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya/Tidak	Ya	1,00		Jelaskan apakah di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan Telah dilakukan pencerminan terhadap potensi benturan kepentingan dan penanganan benturan kepentingan. YA	KPU Kota Balikpapan telah melakukan pencerminan terhadap potensi Penanganan Benturan Kepentingan dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Balikpapan	Laporan Kegiatan Rkor Internal Penanganan Anti Korupsi, Benturan Kepentingan, Gratifikasi dan Sosialisasi WBS.pdf
	c. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	B	0,50		Jelaskan apakah di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan Telah dilakukan evaluasi terhadap potensi benturan kepentingan dan penanganan benturan kepentingan. YA	KPU Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi terhadap potensi benturan kepentingan namun belum secara berkala	Laporan Kegiatan Rkor Internal Penanganan Anti Korupsi, Benturan Kepentingan, Gratifikasi dan Sosialisasi WBS.pdf
	d. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan	A/B/C/D	B	0,67		Jelaskan apakah di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi terhadap potensi benturan kepentingan dan penanganan benturan kepentingan. YA	Belum ada rekomendasi	Laporan Kegiatan Rkor Internal Penanganan Anti Korupsi, Benturan Kepentingan, Gratifikasi dan Sosialisasi WBS.pdf
	vi. Pembangunan Zona Integritas	0,50				0,42	0,83			
	a. Telah dilakukan penancangan Pembangunan zona integritas level unit kerja		Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas	Ya/Tidak	Ya	1,00		Jelaskan apakah Sekretariat KPU Kota Balikpapan Telah melakukan penancangan Pembangunan zona integritas level unit kerja	KPU Kota Balikpapan telah melaksanakan penandatanganan dan penancangan Zona Integritas	https://www.instagram.com/p/DRuuekmDn/
	b. Telah dilakukan pembangunan zona integritas		a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A/B/C	A	1,00		Jelaskan apakah Sekretariat KPU Kota Balikpapan. Telah melakukan pembangunan zona integritas level unit kerja	KPU Kota Balikpapan telah melakukan pembangunan zona integritas dengan membentuk Tim Zona Integritas	SK NO 18 TH 2025 TENTANG TIM ZONA INTEGRITAS.pdf
	c. Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas		a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi	A/B/C	B	0,50		Jelaskan apakah Sekretariat KPU Kota Balikpapan Telah melakukan evaluasi dan melakukan tindak lanjut pembangunan zona integritas level unit kerja	KPU Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas melalui pengisian Lembar Kerja	LKE ZI Tahun 2025 KPU Kota Balikpapan.xlsx
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50				1,40	0,56			
	i. Standar Pelayanan	0,40				0,32	0,81			

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan		a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	B	0,75		Jelaskan apakah setiap pelayanan di lingkungan KPU Kota Balikpapan memiliki standar pelayanan di Standar pelayanan yang ada di sekretariat? 1. dasar hukum 2. Persyaratan 3. Sistem, mekanisme, prosedur (SOP) 4. Jangka waktu penyelesaian 5. Biaya/tarif 6. Produk layanan (PPID, RPP, Konsultasi, dll) 7. Sarana, prasarana dan atau fasilitas (Ruang PPID, dll) 8. Kompetensi pelaksana (syarat menjadi petugas) 9. Pengawasan internal (money layanan) 10. Penanganan pengaduan/Saran masukan 11. Jumlah pelaksana (petugas pklst) : 12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian (Maklumat) 13. Jaminan keamanan (petugas keamanan, fasilitas APAR, dll) 14. Evaluasi kinerja Pelaksana	KPU Kota Balikpapan telah membuat SOP Pemohonan Informasi Publik	https://drive.google.com/file/d/1kQO1Zs1wVodhuibzXW5B4WV9_hXl/view?usp=sharing
	b. Standar pelayanan telah dimaklumkan		a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	A/B/C/D	B	0,67		Komis Pemilihan Umum Kota Balikpapan telah memiliki Maklumat layanan dan telah diinformasikan secara offline maupun online	https://www.instagram.com/p/DO5dSPBkm1E/?igsh=Z3Q2NDND6bWhnZdz	
	c. Dilakukan revaluasi dan perbaikan atas standar pelayanan		a. Dilakukan revaluasi dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan revaluasi dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat	A/B/C/D	A	1,00		KPU Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi melalui Forum Konsultasi Publik	https://www.instagram.com/reel/D08o_TVkC3/?igsh=MTVrVzV4dWV1aHhM4OAE= Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) KPU Kota Balikpapan 11 November 2023.pdf	
	ii. Budaya Pelayanan Prima	0,40	a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D	B	0,67	0,20	Jelaskan apakah KPU Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi (bimtek/workshop/diklat/diklat fungsional/webinar/sertifikasi) bagi pegawai/petugas layanan baik yang dilakukan oleh KPU (Pusat), mandiri dilakukan sekretariat atau menugaskan pegawai untuk mengikuti kegiatan tersebut yang difasilitasi oleh K/L/P lain.	KPU Kota Balikpapan mengikuti kegiatan keprotokolan di lingkungan KPU yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU RI	https://drive.google.com/file/d/1wnUImPELVUQlCmDyF5T0dX48Lz8g/view?usp=drive-link
	b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		a. Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website / media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website / media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses	A/B/C/D	B	0,67		1. Jelaskan apakah di lingkungan KPU Kota Balikpapan informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website / media sosial). 2. PPID KPU telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)	KPU Kota Balikpapan telah menginformasikan tentang pelayanan publik dapat di akses secara online	https://www.instagram.com/reel/DN5FHC3xNXX/?igsh=5GpzZ3p1dZLUNZM1

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
			c.		Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	A/B/C/D	D	0,00		Jelaskan apakah di Sekretariat KPU Kota Balikpapan terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan	KPU Kota Balikpapan belum menerapkan sanksi maupun penghargaan kepada pelaksana layanan	
			d.		Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	D	0,00		Jelaskan apakah di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan, misalnya petugas PPID terlambat hadir dan masyarakat pemohon sudah hadir, apakah yang bersangkutan diberikan sanksi? Apakah yang bersangkutan: 1. Meminta maaf 2. Memberikan makanan/minuman sebagai permintaan maaf baik keterlambatan hadir atau pun proses dokumen melebihi waktu?	Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan	
			e.		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu, namun sarana prasarana layanan belum memenuhi standar sarpras d. Apabila pelayanan belum terpadu	A/B/C/D	A	1,00		Jelaskan apakah di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan Telah terdapat pelayanan terpadu (PPID dan RPP terintegrasi) dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras	KPU Kota Balikpapan telah memiliki fasilitas sarana pelayanan	SARPRAS PPID.pdf
			f.		Telah terdapat inovasi pelayanan a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi lain c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain d. Belum terdapat inovasi pelayanan	A/B/C/D	B	0,67		Jelaskan apakah di sekretariat KPU Kota Balikpapan Terdapat inovasi layanan/tranformasi manual ke digital/pemanfaatan teknologi informasi? Apakah inovasi tersebut sudah direplikasi/dimanfaatkan oleh satker lain?	Pelayanan PPID dapat dilakukan secara	Form Layanan PPID : https://bit.ly/4hU9OU
			III.		Pengelolaan Pengaduan			0,15	0,25			
			a.	0,60	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPORI b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPORI c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan	A/B/C/D/E	C	0,50		Jelaskan apakah di lingkungan KPU Kota Balikpapan Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline/luring/datang langsung dan online (web/portal)? Apakah ada petugas khusus yang menangani? Apakah petugas tersebut juga terintegrasi dengan (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPORI))?	KPU Kota Balikpapan menyediakan informasi terkait SP4N-Lapor	SP4N-LAPORI.pdf
			b.		Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPORI di level Organisasi b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPORI di level unit kerja c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPORI di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPORI di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPORI di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPORI di level unit kerja	A/B/C/D	D	0,00		Jelaskan apakah di lingkungan KPU Kota Balikpapan Terdapat unit yang menangani konsultasi dan pengaduan secara offline/luring/datang langsung dan online (web/portal)? Apakah ada petugas khusus yang menangani? Apakah petugas tersebut juga terintegrasi dengan (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPORI))?	KPU Kota Balikpapan belum memiliki unit khusus serta penugasan khusus untuk SP4N-Lapor	SP4N-LAPORI.pdf

Penilaian			Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
		c. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan		a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan	A/B/C/D	D	0,00		Jelaskan apakah seluruh pengaduan dari berbagai kanal (Dumas, SP4N-LAPORI, Drop Box/Kotak Pengaduan, Bawaslu, DKPP) telah ditindak lanjuti seluruhnya? Berapa Pengaduan yang masuk, berproses dan sudah ditindaklanjuti di tahun ini?		
		d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi		a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	A/B/C		0,50		Jelaskan apakah dilakukan evaluasi terhadap penanganan pengaduan/Konsultasi, baik SOP/kemampuan Petugas/Masukan Publik, fasilitas maupun segala kendala yang dihadapi? Apakah hal tersebut dilakukan berkala? Berapa kali dilakukan dalam 1 tahun?	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik oleh KPU Kota Balikpapan	Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) KPU Kota Balikpapan 11 November 2025.pdf
		iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,70			B	0,39	0,56			
		a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C/D/E	C	0,50		Jelaskan apakah KPU Kota Balikpapan telah melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)? Berapakah dilakukan kegiatan tersebut dalam waktu 1 tahun?	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	SKM Tahun 2025 dan TL SKM 2024
		b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A/B/C	B	0,50		Jelaskan apakah KPU Kota Balikpapan telah melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)? Apakah hasil survei IKM tersebut dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline?	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	SKM Tahun 2025 dan TL SKM 2024
		c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	B	0,67		Jelaskan apakah KPU Kota Balikpapan telah melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan apakah rekomendasi hasil survei tersebut sudah ditindak lanjuti?	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	SKM Tahun 2025 dan TL SKM 2024
		v. Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40				0,33	0,84			
		a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A/B/C/D	B	0,67		Jelaskan penerapan teknologi informasi/aplikasi/portal di lingkungan Sekretariat KPU Kota Balikpapan Dalam memberikan layanan, apakah seluruh layanan eksternal/kepada publik sudah menerapkan layanan berbasis teknologi informasi/aplikasi/portal?		Dokumentasi aplikasi_portal.pdf
		b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	A	1,00		Jelaskan apakah aplikasi/portal dalam memberikan layanan dilakukan perbaikan terus menerus baik oleh sekretariat KPU Kota Balikpapan, maupun Sekretariat Jenderal KPU		Dokumentasi aplikasi_portal.pdf
		II. REFORM	21,70				17,34	0,80			
		1 MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00				2,14	0,71			
		I. Komitmen dalam Perubahan	1,50				0,89	0,59			
		a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi		1 Agen 1 Perubahan	%	18,75%	0,19		Tidak diisi		
		- Jumlah Agen Perubahan			Jumlah	16,00			Jumlah total agen perubahan di SK Tim RB Sekretariat		SK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI.pdf
		- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	3,00			Jelaskan Perubahan apa saja yang dibuat oleh Agen perubahan		Laporan kegiatan terkait reformasi Birokrasi
		b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen		Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan	%	100,00%	1,00		Tidak diisi		
		- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	3,00			Jelaskan Perubahan apa saja yang dibuat oleh Agen perubahan		Laporan kegiatan terkait reformasi Birokrasi
		- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen			Jumlah	3,00			Jelaskan berapa Jumlah Perubahan yang dilakukan Agen perubahan di lingkungan Sekretariat dan sudah diterapkan di lingkungan Sekretariat		Laporan kegiatan terkait reformasi Birokrasi
		II. Komitmen Pimpinan	1,00				0,75	0,75			

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
			- Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan		a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai	A/B/C/D/E	B	0,75		Apakah capaian RB Sekretariat KPU Kota Balikpapan Terdapat di dalam dokumen Renstra ? Jika iya berapa capaian/besaran yang menjadi target?		Perjanjian Kinerja KPU Kota Balikpapan Tahun 2025.pdf Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025.pdf
			III. Membangun Budaya Kerja	0,50				0,50	1,00			
			- Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari		a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	A/B/C/D	A	1,00		Jelaskan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi apa saja yang telah diinternalisasikan ke seluruh anggota organisasi (Anggota & ASN) di lingkungan setempat dan sudah tertuang di dalam SOP/petunjuk teknis, contoh: 1. Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2. Senyum Sapa salam (3S) 3. Knowledge Sharing 4. Disiplin Pakaian Dinas 5. Apel	KPU Kota Balikpapan menerapkan budaya BerAkhlik	https://www.instagram.com/reel/DpVDPbDksp0/7qgsh=MTB3bm1nZHNmZmpubQ==
			2. DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00				1,50	0,75			
			- Peran Kebijakan	2,00				1,50	0,75			
			a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya		a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya b. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya c. Belum memiliki peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan lainnya	A/B/C	B	0,50		Jelaskan apakah terdapat kegiatan yang mengidentifikasi keterkaitan Kebijakan dengan Kebijakan lainnya, misalkan keputusan KPU Provinsi yang terkait Pemilu, Pemilihan, SDM, dll., yang tujuannya agar mempermudah deregulasi kebijakan/merubah/merevisi/mencabut ketika regulasi acuan mengalami perubahan.		Daftar SK Ketua dan Sekretaris Tahun 2025
			b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja		Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit	%	100,00%	1,00		Tidak diisi		
			- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit			Jumlah	30,00					
			- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi			Jumlah	30,00					
			3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1,50				0,75	0,50			
			- Organisasi Berbasis Kinerja	1,50				0,75	0,50			
			- Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.		a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan c. Belum ada usulan	A/B/C	B	0,50		Sekretariat KPU Kota Balikpapan telah melaksanakan perubahan organisasi sesuai dengan SOTK terbaru	SK SOTK	SK SOTK BARU.zip
			4. PENATAAN TATALAKSANA	3,75				3,75	1,00			
			I. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0,50				0,50	1,00			
			- Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan		a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan	A/B/C/D	A	1,00		Seluruh Peta Proses Bisnis telah disusun oleh KPU dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 127 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses bisnis Instansi Pemerintah. Peta Proses bisnis mempengaruhi sebagian kecil (kurang dari 50%) Jabatan.	Perjanjian Kinerja KPU Kota Balikpapan	Perjanjian Kinerja KPU Kota Balikpapan Tahun 2025.pdf
			II. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1,25				1,25	1,00			
			a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien		a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	1,00		Jelaskan tentang penerapaa SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)/ Teknologi Informasi/ Aplikasi terkait layanan publik (stakeholder) yang lebih cepat dan efisien. Apakah SPBE yang diterapkan sifatnya terintegrasi	Penggunaan berbagai aplikasi yaitu: a. Sidalih b. Sipol c. Simpaw d. Simpeg e. Siakba f. PPID	Daftar Aplikasi.pdf

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Unk
			b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien		a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	1,00		Jelaskan tentang implementasi SPBE/penerapan layanan berbasis aplikasi/portal yang sudah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan di dalam/internal KPU yang lebih cepat dan efisien	Penggunaan berbagai aplikasi yaitu: a. Sidalih b. Sipol c. Simpaw d. Simpeg e. Siakba f. PPID	Daftar Aplikasi.pdf
			III. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,00				2,00	1,00			
			a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	A	1,00		Jelaskan apa saja transformasi digital dibidang pelayanan inti Sekretariat (SIDALIH, SIPOL, Situng/Sirekap, SIPAW, dll yang stakeholdernya adalah Eksternal Sekretariat) di lingkungan Sekretariat: 1. Jawab A jika pemanfaatan aplikasi sudah dievaluasi dan ada tindak lanjut secara berkelanjutan 2. Jawab b jika transformasi digital/ aplikasi yang dibuat sudah direalisasikan/diterapkan secara rutin dan berkesinambungan, namun belum dilakukan evaluasi 3. Jawab c jika aplikasi baru dibangun dan belum diterapkan/diterapkan namun tidak rutin/berkelanjutan	Penggunaan berbagai aplikasi yaitu: a. Sidalih b. Sipol c. Simpaw d. Simpeg e. Siakba f. PPID	Daftar Aplikasi.pdf
			b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	A	1,00		Jelaskan apa saja transformasi digital dibidang administrasi (SDM, Perencanaan, Persuratan, umum dll yang stakeholdernya adalah internal Sekretariat) di lingkungan Sekretariat: 1. Jawab A jika pemanfaatan aplikasi sudah dievaluasi dan ada tindak lanjut secara berkelanjutan 2. Jawab b jika transformasi digital/ aplikasi yang dibuat sudah direalisasikan/diterapkan secara rutin dan berkesinambungan, namun belum dilakukan evaluasi 3. Jawab c jika aplikasi baru dibangun dan belum diterapkan/diterapkan namun tidak rutin/berkelanjutan	Penggunaan berbagai aplikasi yaitu: a. Sidalih b. Sipol c. Simpaw d. Simpeg e. Siakba f. PPID	Daftar Aplikasi.pdf
			c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	A	1,00		Jelaskan apa saja transformasi digital dibidang pelayanan publik (PPID, RPP, JDH, dll yang stakeholdernya adalah Eksternal Sekretariat) di lingkungan Sekretariat: 1. Jawab A jika pemanfaatan aplikasi sudah dievaluasi dan ada tindak lanjut secara berkelanjutan 2. Jawab b jika transformasi digital/ aplikasi yang dibuat sudah direalisasikan/diterapkan secara rutin dan berkesinambungan, namun belum dilakukan evaluasi 3. Jawab c jika aplikasi baru dibangun dan belum diterapkan/diterapkan namun tidak rutin/berkelanjutan	Penggunaan berbagai aplikasi yaitu: a. Sidalih b. Sipol c. Simpaw d. Simpeg e. Siakba f. PPID	Daftar Aplikasi.pdf
			5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2,00				1,25	0,63			
			i. Kinerja Individu	1,00				1,00	1,00			
			- Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya		a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil	A/B/C	A	1,00		Jelaskan apakah PK dan SKP di lingkungan Sekretariat berorientasi pada hasil.	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja KPU Kota Balikpapan Tahun 2025.pdf

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
					(outcome) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)						Sasaran Kerja Pegawai	SKP 2025
			ii. Assessment Pegawai	0,50				0,00	0,00			
			- Hasil <i>assessment</i> telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai		a. Seluruh hasil <i>assessment</i> dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil <i>assessment</i> belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil <i>assessment</i> belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C	C	0,00		Apakah mutasi yang dilakukan di lingkungan internal merupakan hasil dari <i>assessment</i> dan mempertimbangkan kompetensi pegawai, kapan dilakukan <i>assessment</i> terakhir di lingkungan Sekretariat?		
			iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,50				0,25	0,50			
			- Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	%	50,00%	0,50		Tidak diisi		
			- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya			Jumlah	4,00			Jumlah pelanggaran ASN tahun lalu	4 Pelanggaran	ND TEGURAN 2024.zip
			- Jumlah pelanggaran tahun ini	0,50		Jumlah	2,00			Jumlah pelanggaran ASN tahun ini	2 pelanggaran	521_TEGURAN TERTULIS (Rajab Sukarta).pdf 520_TEGURAN TERTULIS (Periddar).pdf
			- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman			Jumlah	3,00			Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman	pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran ringan sehingga diberikan Surat Teguran ataupun Nota Dinas Teguran	ND TEGURAN 2024.zip 521_TEGURAN TERTULIS (Rajab Sukarta).pdf 520_TEGURAN TERTULIS (Periddar).pdf
			6 PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75				2,25	0,60			
			i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00				0,50	0,50			
			- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien							Tidak diisi		
			- Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya:							Tidak diisi		
			- Jumlah kegiatan			Jumlah	3,00			Jumlah kegiatan Sekretariat	DIPA TA 2025	DIPA Revisi ke 11_2 November 2025.pdf
			- Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:		Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau lebih					Tidak diisi		
			- Jumlah program			Jumlah	2,00			Jumlah Program Sekretariat yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis dengan capaian sasaran 100% atau lebih	DIPA TA 2025	DIPA Revisi ke 11_2 November 2025.pdf
			- Jumlah kegiatan			Jumlah	3,00			Jumlah Kegiatan Sekretariat yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis dengan capaian sasaran 100% atau lebih	DIPA TA 2025	DIPA Revisi ke 11_2 November 2025.pdf
			- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih		Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	%	100,00%	1,00		Tidak diisi		
			- Jumlah Sasaran Kinerja			Jumlah	2,00			Jumlah Sasaran Kinerja tahun berjalan	DIPA TA 2025	DIPA Revisi ke 11_2 November 2025.pdf
			- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih			Jumlah	3,00			Jumlah sasaran kinerja yang tercapai 100% atau lebih	DIPA TA 2025	DIPA Revisi ke 11_2 November 2025.pdf
			- Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:		Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran Kinerja tercapai 100% atau lebih Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing dibagi dengan Jumlah Anggaran Total	%	0,00%	0,00		Tidak diisi		
			- Jumlah Anggaran Total			Rupiah	2.918.084.000			Jumlah Anggaran total tahun berjalan adalah Rp. 2.918.084.000	DIPA TA 2025	DIPA Revisi ke 11_2 November 2025.pdf
			- Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing			Rupiah	-			Tidak ada anggaran yang difocussing		
			ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	1,00				1,00	1,00			
			- Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran		a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi penganggaran b. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi penganggaran c. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah dimanfaatkan untuk monitoring kinerja d. Aplikasi belum digunakan untuk pemanfaatan monitoring kinerja	A/B/C/D	A	1,00		Jelaskan Pemanfaatan aplikasi-aplikasi pengukuran capaian kinerja dan kinerja anggaran, apakah aplikasi tersebut digunakan sebagai alat untuk monitoring untuk pengambilan kebijakan kinerja dan anggaran	Penggunaan berbagai aplikasi yaitu: a. Sidalih b. Sipol c. Simpaw d. Simpeg e. Siakba f. PPID	Daftar Aplikasi.pdf
			III. Pemberian Reward and Punishment	1,00				0,00	0,00			

Penilaian			Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Unk
		- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment oleh unit kerja		a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment; b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment; c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment; d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian reward and punishment.	A/B/C/D	D	0,00		Jelaskan tentang pemberian penghargaan/hukuman di lingkungan Sekretariat: 1. Apakah Pencapaian Perjanjian Kinerja menjadi unsur dalam Pemberian Penghargaan/Hukuman: 2. Apakah Capaian SKP menjadi unsur dalam pemberian Penghargaan/Hukuman	KPU Kota Balikpapan belum memberikan reward ataupun punishment	
		iv. Kerangka Logis Kinerja	0,75				0,75	1,00			
		- Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai		a. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; b. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; d. Peta strategis (Kerangka Logis) belum ada.	A/B/C/D	A	1,00		Peta strategis atau kerangka logis merupakan penerapan keterhubungan antara instrumen perencanaan kinerja, apakah ada hubungan Sasaran Strategis di dalam renstra dengan rencana kerja tahunan, penetapan kinerja dan sasaran kinerja pegawai (SKP), diukur dengan reviu atas SAKIP Sekretariat.	Matrik Pembagian Peran dan Hasil pada setiap Sub Bagian	Matrik Pembagian Peran dan Hasil
		7 Penguatan Pengawasan	1,95				1,95	1,00			
		i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75				0,75	1,00			
		- Persentase penyampaian LHKPN		Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005	%	100,00%	1,00		Tidak diisi		LHKPN https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aW0lqvvo1Rh02pFwCobp4HcRy5mrdzX/edit?usp=drive_link&ouid=111285995419564871909&rtfpof=true&sd=true
		- Jumlah yang harus melaporkan			Jumlah	6,00			Tidak diisi		
		- Eselon I/II			Jumlah	0,00			Jelaskan jumlah pejabat Eselon I/II yang wajib LHKPN		
		- Lainnya			Jumlah	6,00			Jelaskan jumlah pejabat Eselon lainnya dan Anggota yang Wajib Melaporkan LHKPN	Anggota KPU Kota Balikpapan dan Sekretaris KPU Kota Balikpapan	
		- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	6,00			Jumlah Total yang sudah melaporkan di tahun berjalan	Telah melaporkan semua	
		ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	0,60				0,60	1,00			
		- Persentase penyampaian LHKASN		Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015	%	100,00%	1,00		Tidak diisi		
		- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)			Jumlah	8,00			Tidak diisi		
		- Jumlah Eselon III			Jumlah	0,00			Tidak ada eselon III		
		- Jumlah Eselon IV			Jumlah	4,00			Jumlah Eselon IV yang terdapat di KPU Balikpapan sejumlah 4		
		- Jumlah Fungsional dan Pelaksana			Jumlah	4,00			Jumlah Pelaksana yang terdapat di KPU Kota Balikpapan sejumlah 4		
		- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	8,00			Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKASN sejumlah 8		
		iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60				0,60	1,00			
		- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat		Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	%	100,00%	1,00		Tidak diisi		
		- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti			Jumlah	0,00			Jelaskan Jumlah total pengaduan masyarakat dari berbagai kanal layanan pengaduan, termasuk sengketa dan pelaporan kode etik		
		- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses			Jumlah	0,00			Jelaskan Jumlah pengaduan masyarakat dari berbagai kanal layanan pengaduan, termasuk sengketa dan pelaporan kode etik yang saat ini sedang berproses		
		- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti			Jumlah	0,00			Jelaskan Jumlah pengaduan masyarakat dari berbagai kanal layanan pengaduan, termasuk sengketa dan pelaporan kode etik yang saat ini sudah selesai ditindaklanjuti		
		8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75				3,75	1,00			
		i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50				2,50	1,00			

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan publik yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi	A/B/C/D	A	1,00		Jelaskan upaya atau inovasi pelayanan baik pemilu atau pun non pemilihan dilingkungan Sekretariat yang bertujuan memperbaiki/memenuhi mekanisme/melengkapi prasyarat standar pelayanan sebagaimana Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik dimana setiap pelayanan publik :: 1. Persyaratan yang harus dipenuhi stakeholder (dipermudah); 2. Kemudahan prosedur/mechanisme layanan (menggunakan Teknologi Informasi, dll.) 3. Mempercepat waktu proses sehingga Stakeholder tidak menunggu lama 4. Kejelasan biaya layanan (Gratis) dan diumumkan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	SKM Tahun 2025 dan TL SKM 2024
b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Alur lebih pendek/singkat 3. Terintegrasi dengan aplikasi		Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar	%	100,00%	1,00		Tidak diisi		
- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar			Jumlah	3,00			Jumlah pelayanan yang tersedia di Sekretariat adalah: 1. Pencalonan DPR dan DPRD; 2. Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu; 3. Pencalonan Kepala Daerah; 4. PPID; 5. RPP; 6. Konsultasi; 7. Audiensi; 8. Sosialisasi; 9. Perbaikan Data Pemilih; 10.	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	SKM Tahun 2025 dan TL SKM 2024
- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah			Jumlah	3,00			Jelaskan dari (n) Jumlah layanan di atas mana saja yang dipermudah?	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	SKM Tahun 2025 dan TL SKM 2024
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25				1,25	1,00			
- Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab		a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas	A/B/C/D	A	1,00		Jelaskan: 1. Jumlah/kanal- Kanal aduan yang ada di lingkungan sekretariat (Tanggapan Masyarakat terkait Data Pemilih Berkelanjutan, E- PPID) 2. Jumlah layanan konsultasi apa saja yang ada di sekretariat (Helpdesk SIPOL) 3. Jumlah stakeholder yang telah mengakses kanal baik pengaduan dan konsultasi di tahun berjalan		Form Layanan PPID : https://bit.ly/4hU9OU

